

## **Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2019**

**Restiatun\***

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Di era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan yang lebih luas dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah pada pengembangan potensi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam proses pembangunan ekonomi memerlukan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang membutuhkan indikator-indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang sangat concern dengan proses pembangunan daerahnya. Mengingat pentingnya indikator ekonomi dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Sekadau, maka perlu disusun indikator-indikator ekonomi secara komprehensif, lengkap, dan kontinyu. Indikator-indikator makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi bagi proses pembangunan di Kabupaten Sekadau adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPAK, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, IPM, Gini ratio, ICOR, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Angka pengganda output dan ketimpangan sektoral. Temuan dari kajian ini bahwa selama masa pengamatan tahun 2015 – 2019 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi turun, TPAK meningkat selama 2015 – 2017 kemudian turun hingga tahun 2019, tingkat pengangguran meningkat sejak 2017 hingga 2019, kemiskinan turun sejak 2017, nilai IPM meningkat, Gini ratio berfluktuasi tetapi dengan trend menurun, ICOR meningkat tetapi sejak 2018 menurun, pengeluaran baik konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah meningkat, tetapi pertumbuhan menurun terjadi pada pengeluaran investasi, serta indeks ketimpangan sektoral meningkat.

**JEL:** E00

**Kata kunci:** Indikator, Makroekonomi, Trend

### **1. PENDAHULUAN**

Di era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan yang lebih luas dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah pada pengembangan potensi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah daerah dapat menentukan prioritas kebijakan dan arah program pembangunannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah-lah (provinsi dan kabupaten) yang paling mengerti potensi yang dimiliki daerah tersebut, sehingga dengan adanya desentralisasi ini diharapkan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan lebih optimal.

Proses pembangunan ekonomi memerlukan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang membutuhkan indikator-indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif memerlukan dukungan data makro regional yang dikeluarkan oleh instansi yang

---

\* E-mail: hariesty@yahoo.com

berwenang, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan data-data yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang berkaitan. Dengan kepemilikan data yang konsisten dan terintegrasi dalam perekonomian secara keseluruhan, maka hal ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung atas sebuah kebijakan.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang sangat concern dengan proses pembangunan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari visi yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sekadau yang maju mandiri dan berdaya saing”. Mengingat pentingnya indikator ekonomi dalam proses pembangunan, maka perlu disusun indikator-indikator ekonomi secara komprehensif, lengkap, dan kontinyu. Penyusunan indikator-indikator ini dimaksudkan untuk mencapai visi tersebut serta menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sekadau. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap indikator ekonomi daerah diharapkan pelaku ekonomi baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat dapat menyusun perencanaan pengembangan ekonomi Kabupaten Sekadau yang lebih baik agar sasaran-sasaran yang ditetapkan bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Pembangunan kapasitas pemerintah lokal merupakan salah satu faktor penting dalam transformasi suatu negara menuju sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan para pembuat kebijakan lokal (birokrat dan politisi) untuk menyediakan pelayanan public dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi wajibnya. Amponsah (1999) mengemukakan bahwa terdapat hal-hal fundamental yang harus dipenuhi untuk mencapai peningkatan pertumbuhan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Good governance dan privatisasi.

Kualitas pemerintah dalam perekonomian diyakini akan menentukan efektivitas dan kesinambungan reformasi ekonomi yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi.

2. Kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia.

Investasi pada sektor pendidikan dan human capital akan meningkatkan ketrampilan dan efisiensi dalam proses produksi melalui adopsi dan pembangunan teknologi baru. Sedangkan dampak pertumbuhan penduduk akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan, disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memberikan tekanan terhadap sumberdaya yang terbatas bagi penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

3. Stabilitas makroekonomi.

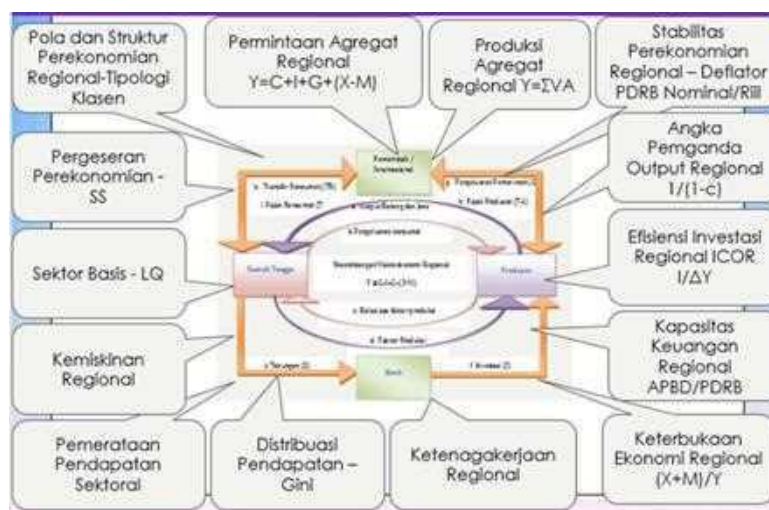
Dengan kondisi makroekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan investasi dan tabungan.

4. Kebijakan perdagangan terbuka.

Kebijakan ini akan meningkatkan pertumbuhan dan kecepatan proses konvergensi.

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan kerangka berpikir aliran melingkar perekonomian seperti ditunjukkan pada gambar. Empat agen pelaku ekonomi regional yang menentukan perkembangan ekonomi daerah meliputi rumah tangga, produsen, perbankan dan pemerintah ataupun masyarakat internasional. Keempat pelaku tersebut saling berinteraksi dan saling melakukan transaksi ekonomi di suatu wilayah daerah. Transaksi-transaksi tersebut kemudian menghasilkan pendapatan, tabungan ataupun investasi. Namun, ada juga yang harus dikeluarkan dalam transaksi tersebut, seperti pajak dan belanja. Transaksi-transaksi tersebut menentukan

pembangunan ekonomi di suatu daerah, sehingga dibutuhkan indikator-indikator ekonomi tertentu untuk mengukurnya dan merumuskan kebijakan yang tepat.



Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat beberapa indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan suatu daerah, antara lain: PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB Menurut Pendekatan Produksi, Angka Penganda Output, Efisiensi Investasi, Kapasitas Keuangan Daerah, Keterbukaan Ekonomi, Indeks Ketimpangan Sektoral, Inflasi, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat sekunder yang mayoritas bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sekadau. Tahap analisis data dapat dilakukan setelah data yang dibutuhkan dalam proses penelitian didapatkan secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis akan menentukan keakuratan dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat dua macam analisis data, yakni analisis kuantitatif analisis kualitatif, dan analisis trend.

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini meliputi beberapa alat analisis yang secara umum digunakan untuk melihat kinerja perekonomian. Alat-alat tersebut adalah seperti tersebut yang dijelaskan pada kajian pustaka. Sedangkan Analisis data kualitatif dilakukan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data, memilah - milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Untuk analisis trend dilakukan dengan tujuan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Metode yang digunakan untuk mencari trend dengan menggunakan metode kudrat terkecil (Least Square Methods).

### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Taraf Hidup Masyarakat Kabupaten Sekadau

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Sekadau dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat. Kemajuan perekonomian Kabupaten Sekadau dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah nilai PDRB. Berikut ini merupakan Grafik Nilai PDRB Kabupaten Sekadau Tahun 2014-2019 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Fakta ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sekadau memiliki kinerja pertumbuhan yang baik, karena sepanjang tahun pengamatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau menunjukkan angka yang positif, meskipun cenderung menurun. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi riil Sekadau sepanjang tahun 2014 – 2019 sebesar 5,77% dan 10,52% untuk pertumbuhan nominal, serta terdapat kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun sepanjang tahun pengamatan, baik pertumbuhan riil maupun pertumbuhan nominal.



Gambar 1. PDRB Kabupaten Sekadau Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan data PDRB tahun 2014 – 2019, baik berdasar harga konstan maupun harga berlaku, dapat disusun trend besaran nilai PDRB Kabupaten Sekadau selama lima tahun ke depan yaitu tahun 2020 – 2025.



Gambar 3. Trend Nilai PDRB Kabupaten Sekadau Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2020 – 2025



Gambar 4. Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2025

Gambar di atas menyajikan trend nilai PDRB Kabupaten Sekadau dan pertumbuhan ekonominya, berdasar harga konstan maupun harga berlaku. Berdasar grafik tersebut terlihat adanya trend kenaikan nilai PDRB Kabupaten Sekadau selama tahun 2020 - 2025, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung menurun. Adapun trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau selama lima tahun ke depan memiliki rata-rata sebesar 9,71% untuk tingkat pertumbuhan nominal dan 5,29% untuk pertumbuhan riil.

Tingkat kesejahteraan masyarakat, selain ditentukan oleh tingkat pendapatan juga ditentukan oleh tingkat harga. Given pendapatan, jika terjadi kenaikan tingkat harga secara umum atau dengan kata lain tingkat inflasi tinggi maka akan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Semakin tinggi inflasi, maka akan menggerus daya beli masyarakat. Berikut ini disajikan inflasi yang terjadi di Kabupaten Sekadau sepanjang tahun 2015 – 2019. Rata-rata tingkat inflasi Kabupaten Sekadau sepanjang tahun pengamatan sebesar 4,49%.



Gambar 5. Tingkat Inflasi Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2025

Gambar 6. Trend Tingkat Inflasi Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Berdasar gambar di atas terlihat bahwa tingkat inflasi tertinggi sepanjang tahun 2014 – 2019 terjadi pada tahun 2015 (4.89%) dan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 (4,15%). Berdasar data inflasi Kabupaten Sekadau tahun 2014 – 2015, disusun trend tingkat inflasi untuk tahun 2020 – 2025. Hasil analisis trend menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Sekadau untuk tahun 2020 – 2025 menurun. Trend inflasi ini termasuk kategori rendah, karena berada pada level di bawah 5%, dengan rata-rata inflasi sepanjang masa pengamatan sebesar 3,58%.

Salah satu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sekadau adalah untuk mengurangi pengangguran terbuka. Karena pengangguran merupakan salah satu penyebab terjadinya beberapa permasalahan dalam kehidupan masyarakat, di antaranya masalah kemiskinan, masalah kriminalitas, masalah rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sekadau berupaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui upaya-upaya yang dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).



Gambar 7. TPAK Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2019

Gambar 8. Trend TPAK Kabupaten Sekadau 2020 – 2025

Sepanjang tahun 2015 – 2019, TPAK Kabupaten Sekadau meningkat selama tahun 2015 – 2017, tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan TPAK dan kembali meningkat pada tahun 2019. Tetapi jika dilihat trend selama lima tahun ke depan (2020 – 2025) terjadi trend penurunan TPAK di Kabupaten Sekadau. Dan jika hal ini tidak diantisipasi dengan mempersiapkan strategi untuk mengatasinya sejak dini maka hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan pembangunan

lainnya. Tinggi rendahnya TPAK berkorelasi negative dengan tingkat pengangguran terbuka. Semakin tinggi TPAK suatu daerah, maka semakin rendah tingkat penganggurannya.

Upaya-upaya yang dapat meningkatkan TPAK dan pengurangan pengangguran terbuka mutlak harus dilakukan karena keberhasilan dalam peningkatan TPAK dan penurunan tingkat pengangguran salah satunya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sekadau. Selama tahun 2014 – 2019 di Kabupaten Sekadau terjadi trend penurunan jumlah jumlah penduduk miskin dan jika dilihat trend nya sampai dengan tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sekadau akan terus mengalami penurunan. Sepanjang masa pengamatan rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 12.368, 6 jiwa penduduk miskin. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk dapat menciptakan program-program pembangunan daerah yang pro-poor yakni untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan menyusun strategi pembangunan daerah yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan (pro-job).



Gambar 11. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2019      Gambar 12. Trend Penduduk Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Keberhasilan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan manusia dapat dilihat dari nilai IPM. Sepanjang masa pengamatan, terjadi kenaikan nilai IPM Kabupaten Sekadau dan nilai rata-rata nilai IPM sepanjang tahun 2014 – 2018 adalah sebesar 62,66. Adapun untuk trend nilai IPM Kabupaten Sekadau selama tahun 2020 – 2025 juga terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 65,59. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Sekadau membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.



Gambar 17. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2018

Gambar 18. Trend Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025



Selain masalah kemiskinan, permasalahan lain yang menjadi prioritas untuk diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau adalah masalah kesenjangan pendapatan. Sepanjang tahun 2014 – 2018 terjadi fluktuasi dalam hal kesenjangan pendapatan di Kabupaten Sekadau. Adapun rata-rata indeks Gini sepanjang masa pengamatan sebesar 0,29. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sekadau relatif kecil sepanjang masa pengamatan. Sementara untuk trend pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Sekadau juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari nilai trend koefisien Gini yang semakin menurun sepanjang tahun 2019 – 2024. Hal ini disajikan pada gambar berikut.



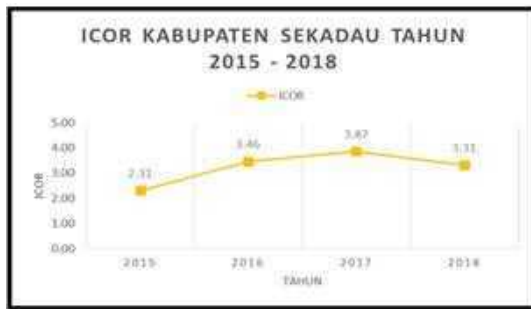
Gambar 19. Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Sekadau 2014 – 2018



Gambar 20. Trend Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau menyadari pentingnya kegiatan investasi dalam proses pembangunan daerah. Perhatian bukan hanya diberikan pada besarnya investasi nominal tetapi juga pada efisiensi investasi yang dilakukan, metode yang dapat dilakukan untuk melihat efisiensi investasi dengan cara mencermati nilai ICOR. Pentingnya ICOR ini akan tampak ketika digunakan untuk menguji konsistensi antara target pertumbuhan ekonomi dengan tambahan modal yang mungkin akan terkumpul dari investasi yang sedang berjalan. Di bawah ini disajikan data ICOR Kabupaten Sekadau selama tahun 2014 – 2018. Dari tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata ICOR Kabupaten Sekadau sepanjang tahun 2015 – 2018 sebesar 3,24 dan sepanjang tahun pengamatan terlihat bahwa efisiensi investasi di Kabupaten Sekadau fluktuatif. Tetapi meskipun nilai ICOR fluktuatif, terlihat bahwa efisiensi investasi di Kabupaten Sekadau cukup tinggi karena memiliki rata-rata nilai ICOR di bawah 4. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sekadau masih perlu melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efisiensi atau minimal tetap mempertahankan nilai ICOR yang ada pengaruh investasi dapat lebih dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, di samping karena dari hasil penghitungan trend terjadi kenaikan ICOR pada lima tahun ke depan (2020 – 2025).

Jika pemerintah daerah Kabupaten Sekadau masih dengan strategi investasi yang ada, maka dapat dilihat trend ICOR selama 5 tahun ke depan seperti gambar di atas. Given strategi pembangunan dan strategi investasi, selama lima tahun ke depan hingga tahun 2025, tingkat efisiensi investasi di Kabupaten Sekadau menurun, karena berdasar perhitungan trend, hingga tahun 2015 nilai ICOR Kabupaten Sekadau masih di atas 4.



Gambar 21. ICOR Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2018



Gambar 22. Trend ICOR Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

### B. Analisis kinerja sektoral Kabupaten Sekadau

Secara teoritis dalam penghitungan pendapatan nasional ataupun pendapatan daerah dari sisi pengeluaran, terdapat beberapa jenis pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto. Identifikasi jenis pengeluaran ini penting untuk dilakukan karena dari data tersebut akan dapat diketahui seberapa besar efek penggandanya terhadap perekonomian. Hal ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan jenis pengeluaran, table di atas menyajikan nilai PDRB berdasarkan Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2018.

Berdasar gambar di bawah ini terlihat trend peningkatan untuk semua jenis pengeluaran, tetapi sepanjang tahun pengamatan total pengeluaran konsumsi mendominasi dari seluruh pengeluaran. Jenis pengeluaran kedua tertinggi setelah pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran investasi dan yang terakhir adalah pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penggerak utama perekonomian daerah Kabupaten Sekadau adalah aktivitas konsumsi. Secara teoritis, dalam jangka pendek tingkat pengeluaran konsumsi yang tinggi akan berdampak positif bagi perekonomian, tetapi dalam jangka panjang jika tingginya tingkat konsumsi yang diikuti dengan trend kenaikan tidak dibarengi dengan peningkatan investasi maka hal ini dapat memicu terjadinya hyper inflasi. Untuk menekan potensi inflasi, maka kegiatan yang sifatnya konsumtif harus diikuti kegiatan yang sifatnya produktif.



Gambar 23. PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2018



Gambar 24. Trend PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025





Gambar 26. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2018



Gambar 27. Trend Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Berdasar Harga Konstan Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2025

Untuk melihat efek pengganda dari masing-masing jenis pengeluaran terhadap perekonomian daerah, maka perlu dilakukan penghitungan angka pengganda output yang terdiri atas angka pengganda konsumsi, angka pengganda investasi, dan angka pengganda pengeluaran pemerintah. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan angka pengganda output Kabupaten Sekadau selama tahun 2015 - 2018 serta prediksi trendnya untuk tahun 2020 - 2025.

Dari data yang disajikan berikut, selama masa pengamatan sepanjang tahun 2015 - 2018 pengeluaran pemerintah memiliki rata-rata angka pengganda tertinggi, diikuti oleh pengeluaran investasi dan konsumsi. Hal ini mungkin disebabkan pengeluaran pemerintah dilakukan melalui alokasi dana desa sehingga mampu menggerakkan perekonomian bahkan pada level desa, sehingga secara agregat hal ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah. Jika dibandingkan dengan total pengeluaran konsumsi, rata-rata pengeluaran pemerintah ini dengan besaran di bawah pengeluaran konsumsi, tetapi kenyataannya pengeluaran pemerintah lebih mampu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dibanding pengeluaran lain. Dan angka pengganda konsumsi menduduki urutan terendah meskipun rata-rata total pengeluaran konsumsi menempati urutan tertinggi sepanjang tahun 2015 - 2018.



Gambar 28. Angka Pengganda Output berdasarkan pengeluaran Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2018



Gambar 29. Trend Angka Pengganda Output berdasarkan pengeluaran Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2025

Pembangunan di Kabupaten Sekadau dilaksanakan di semua sektor agar tidak terjadi ketimpangan antar sektor. Untuk mengukur ketimpangan output antar sektor dalam perekonomian

digunakan Indeks Ketimpangan Sektor (IKS). Berdasar tabel di bawah ini terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Sektor (IKS) Kabupaten Sekadau sepanjang tahun 2015 – 2019 tinggi dengan rata-rata sebesar 0,49. Artinya terdapat perbedaan yang tinggi dalam tingkat output untuk masing-masing sektor dalam perekonomian. Adapun secara grafis IKS Kabupaten Sekadau sepanjang masa pengamatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 30. Indeks Ketimpangan Sektor Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2019



Gambar 31. Trend Indeks Ketimpangan Sektor Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2025

Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau harus mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang memiliki tingkat output rendah selanjutnya sektor tersebut harus mendapatkan dorongan yang kuat dari pemerintah daerah sehingga sektor tersebut dapat mengejar (catch up) sektor perekonomian yang memiliki tingkat output tinggi sehingga ketimpangan output sektoral dapat dikurangi.

## 5. KESIMPULAN

Indikator-indikator makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi bagi proses pembangunan di Kabupaten Sekadau adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPAK, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, IPM, Gini ratio, ICOR, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Angka pengganda output dan ketimpangan sektoral.

Temuan dari kajian ini bahwa selama masa pengamatan tahun 2015 – 2019 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi turun, TPAK meningkat selama 2015 – 2017 kemudian turun hingga tahun 2019, tingkat pengangguran meningkat sejak 2017 hingga 2019, kemiskinan turun sejak 2017, nilai IPM meningkat, Gini ratio berfluktuasi tetapi dengan trend menurun, ICOR meningkat tetapi sejak 2018 menurun, pengeluaran baik konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah meningkat, tetapi pertumbuhan menurun terjadi pada pengeluaran investasi, serta indeks ketimpangan sektoral meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amponsah, William et.al. (1999). Global Trade Integration and Economic Convergence of Developing Countries. *American Journal of Agriculture Economics*, No. 5: 1142-1148.
- BPS. (2019). *Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2019*. Sekadau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau.
- Grossman, G.M. and Helpman E. (1994). Endogenous Innovation in The Theory of Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8, 23-44.

- Jhingan, M. L. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan), Edisi Ketujuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Leichenko, Robin M. 2000. Export, Employment and Production: A Causal Assessment of US and Regions. *Economics Geography* Vol.76 No.4, Oktober, 303-325.
- Mankiw, N. G. (2011). *Principles of Economics, Sixth Edition*. South-Western Cengage Learning.
- Render, B, et al. (2006). *Quantitative Analysis for Management*. Australia: Pearson Prentice Hall.
- Saaty, TL. (1990) *Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex Word*. USA: University of Pittsburgh.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yamit, Z. (1994). *Manajemen Kuantitatif untuk Bisnis (Operation Research)*. Yogyakarta: BPF
- Zikmund, W.G. (2001). *Business Research Method*, Forth Word: Harcourt Inc.